

JARINGAN SOSIAL (*NETWORKS*) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial

Social Networks for Developing Agribusiness: A Theoretical Perspective and Dynamics of Social Capital Study

Ketut Gede Mudiarta

*Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan 29, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540*

ABSTRACT

The limited possession of resources such as physical capital especially land, finance, and technology need social resources empowerment as potential local resources followed by equality and inclusiveness in implementing of development programs. This paper tries to elaborate sociological theory in the dynamics of social capital study especially social networks linked to the social reality on empirical level. In line with the theories of new institutionalism, social networks, diffusion of innovation, and social mobility, on the empirical level it shows that agribusiness development is not supported by synchronization of policy environment in macro level, informal rules at meso level, and individual needs in micro level and availability of informal rules at meso and micro levels in the community. The failure of agribusiness development is also believed to be affected by unequal social-resources and also by less concern on the effect of economic benefit on social network, i.e. without considering the following aspects, e.g. (i) Norm and density network; (ii) The Strength of Weak Ties; (iii) The Importance of " Structural Holes; and (iv) The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action in developing agribusiness. Agribusiness community will keep facing obstacles to grab opportunity in accessing information and technology innovation and in turn it will lower productivity, income and welfare as well as vertical mobility.

Key words : *social network, social capital, vertical mobility, agribusiness system*

ABSTRAK

Keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan sumber daya lahan, modal finansial dan teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai potensi sumber daya lokal, serta dengan memperhatikan segi pemerataan (*equality*) dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan. Tulisan ini berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial terutama aspek jaringan sosial (*networks*) yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru (*new institutionalism*), teori jaringan, teori difusi inovasi, dan teori mobilitas vertikal; ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Selain itu, juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal (*informal rules*) di level meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial (*network*) terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadatan (*density*) jaringan, kuat dan lemahnya ikatan (*ties*), peran lubang struktural (*structural holes*), dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal.

Kata kunci : *jaringan sosial, kapital sosial, mobilitas vertikal, sistem agribisnis*

PENDAHULUAN

Pemikiran mengenai kapital sosial yang dibangun dari hasil studi empiris maupun studi

literatur telah memberikan arah penting dalam kajian sosiologis maupun ekonomi. Pemanfaatan sumber daya material saja tidak lagi memadai dalam menjelaskan fenomena pembangunan, termasuk pembangunan pertanian, karena ter-

dapat keterbatasan individu dalam penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material. Terbatasnya penguasaan sumber daya lahan, modal finansial dan teknologi, menyebabkan perlunya upaya untuk memberdayakan potensi kapital sosial. Pemberdayaan kapital sosial tidak terlepas dari potensi sumber daya lokal yang meliputi aspek struktur dan kelembagaan lokal.

Pembangunan sumber daya sosial sampai saat ini kurang memadai, yang terlihat dari lemahnya dukungan lingkungan kebijakan (*policy environment*) berupa regulasi (*formal rules*) dan dukungan politik pertanian. Hal ini mengakibatkan lemahnya persediaan sumber-sumber sosial yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan peluang pelaku agribisnis terutama petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengembangan agribisnis terkesan mengabaikan peningkatan kesejahteraan petani, karena hanya fokus pada peningkatan produksi. Hal ini merupakan bias dari amanat UUPA No.5/1960 dan Tap MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pengembangan kapital sosial sesungguhnya demikian penting, karena akan dapat berkontribusi dalam upaya pengembangan agribisnis dan sekaligus merupakan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini selaras dengan amanat UU. No. 32 tentang Pemerintahan Daerah serta UU.No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Kedua produk hukum ini secara normatif sangat mendukung akselerasi pemyarakatan inovasi pertanian di daerah. Regulasi dalam bidang penyuluhan pertanian sebagai *formal rules* digulirkan karena adanya gejala semakin melemahnya sistem alih teknologi dan adanya kecenderungan alih teknologi yang kurang tepat sasaran (RPJM Deptan, 2005-2009). Pembangunan pertanian selama ini belum efektif melakukan pemberdayaan potensi lokal baik secara struktural maupun kultural. Gejala sosial berupa mudarnya pemberdayaan potensi lokal, sesungguhnya merupakan suatu masalah sosiologis yang sangat mendasar, yang antara lain ditunjukkan oleh semakin terpinggirkannya sumber daya lokal oleh arus globalisasi.

Wacana dan perdebatan mengenai jaringan sosial telah berlangsung sejak tahun 1920-an, dan kembali mendapat perhatian

sejak Bourdeau (1980), Coleman (1988) dan Putnam (1993) mengemukakan pandangannya dan hasil penelitiannya mengenai kapital sosial. Pesatnya perkembangan studi-studi kapital sosial dipengaruhi juga oleh adanya publikasi "*Social Capital Initiative Working Papers*" oleh World Bank yang antara lain mengetengahkan hasil penelitian dari Woolcock (2000), Grootaert (1999), serta Narayan (1999). Di Indonesia, beberapa penelitian mengenai kapital sosial telah dilakukan antara lain oleh Grootaert (2001) yang mengkaji peran kapital sosial dalam mengentaskan kemiskinan, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2005) mengenai kehidupan berorganisasi, serta di Bali sudah terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Vipriyanti (2007) dengan memfokuskan kepada keterkaitan antara kapital sosial dengan pembangunan ekonomi wilayah.

Tulisan ini menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat petani dan potensi lokal dalam implementasi suatu program pembangunan introduksi *supra system* dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini relevan untuk dikaji mengingat semakin terdesaknya sektor pertanian dalam pembangunan di beberapa wilayah. Secara lebih detail, paper ini berupaya mencermati penerapan (*using theory*) antara lain teori Granovetter (2005) mengenai ketertambatan (*embeddedness*) tindakan ekonomi yang melekat pada jaringan sosial, teori Nan Lin (2000) mengenai *inequality* sumber-sumber sosial, teori kelembagaan baru (*New Institutionalism*) dari Victor Nee (2005), dan teori difusi inovasi yang digagas oleh Roger (1983). Dalam paper ini juga didiskripsikan dinamika konsep kapital sosial terutama jaringan sosial (*networks*) dan perkembangannya di Indonesia dikaitkan dengan pengembangan agribisnis berbasis komunitas, analisis beberapa perspektif teori sosiologi khususnya sosiologi ekonomi dalam kajian-kajian kapital sosial, deskripsi isu-isu studi mengenai pemberdayaan jaringan sosial sebagai sumber kapital sosial dan implikasinya bagi penelitian selanjutnya, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penguasaan dan pemanfaatan jaringan sosial dalam peningkatan adopsi inovasi teknologi dan pengaruhnya bagi peluang peningkatan kesejahteraan komunitas agribisnis.

PERSPEKTIF TEORI DALAM KAJIAN JARINGAN SOSIAL

Grootaert (2002) menyatakan bahwa kapital sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan kapital ekonomi di tingkat rumah tangga. Bahkan menurutnya, kontribusi kapital sosial sebanding dengan modal manusia. Artinya kapital sosial yang bersifat non fisik diyakini mampu menandingi peran kapital fisik. Pendapat itu tentunya kurang lengkap jika aspek kelembagaan, organisasi sosial, norma, kepercayaan maupun jaringan sosial tidak dianalisis secara detail dengan mengutarakan analisis mengenai peran masing-masing sumber kapital sosial itu. Bisa saja terjadi keragaman tingkat ketersediaan sumber-sumber daya sosial antara individu, kelompok, atau dalam komunitas tertentu, yang didominasi oleh kontribusi jaringan kerja yang ada. Dengan demikian, peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas *lokal* sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aspek kultur maupun struktur masyarakat yang berbeda antar wilayah akan memunculkan perbedaan ketersediaan sumber-sumber sosial.

Penelitian Ibrahim (2005) di Jakarta tidak menemukan jaringan kerjasama antar organisasi berlainan jenis, sehingga ko-produksi di antara organisasi sosial menjadi rendah. Sementara itu, salah satu temuan Vipriyanti (2007) yang cukup menarik adalah mengenai dominannya kontribusi jaringan kerja dalam pembangunan ekonomi wilayah. Mencermati temuan Vipriyanti (2007) seperti dijelaskan di muka, bisa diketengahkan bahwa kuatnya ikatan sosial (*strength ties*) pada organisasi sosial tradisi seperti *subak* maupun *banjar* di Bali, ternyata mampu memanfaatkan jaringan kerja secara optimal.

Perkembangan pemikiran mengenai kapital itu sendiri tidak terlepas dari kritik, terutama mengenai beragamnya konsep dan definisi mengenai kapital sosial. Aspek lainnya yang perlu dicermati adalah mengenai penentuan indikator yang sesuai dalam mengukur kapital sosial, serta dalam hal bagaimana membangun atau mengembangkan kapital sosial. Perbedaan pandangan dan cara men-

definiskan kapital sosial juga terkait dengan metode yang digunakan untuk menjelaskan kapital sosial itu sendiri. Akan tetapi, bagaimanapun perbedaan cara pandang dan metode analisis dalam studi-studi kapital sosial, ternyata tidak saling mempertentangkan peran kapital sosial terutama kontribusi jaringan sosial (*network*) dalam dinamika pembangunan, termasuk dalam upaya pengembangan komunitas agribisnis.

Perspektif Sosiologi Ekonomi Pemberdayaan Jaringan Sosial dalam Pengembangan Agribisnis

Pandangan mengenai sosiologi ekonomi dari Smelser dan Swedberg (2005) sangat penting untuk dicermati dalam kerangka membangun pemahaman atas perspektif sosiologis yang digunakan atau diterapkan dalam fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang terbatas. Konsep ini dikutip Smelser dan Swedberg (2005) dari pendapat Weber maupun Durkheim, yaitu: *“Economic sociology can be defined as the sociological perspective applied to economic phenomena. A similar but more elaborate version is the application of the frames of reference, variables, and explanatory models of sociology to that complex of activities which is concerned with the production, distribution, exchange, and consumption of scarce good and services”*.

Lebih lanjut, Smelser dan Swedberg mengemukakan perspektif sosiologis dalam konteks ini yang meliputi interaksi personal, kelompok (*grup*), struktur sosial, kelembagaan, dan kontrol sosial termasuk sanksi, norma, dan nilai. Dalam perkembangan selanjutnya juga ditambahkan aspek jaringan sosial (*social networks*), gender, dan kultur sebagai aspek yang mejadi fokus perhatian dalam sosiologi ekonomi.

Pemberdayaan jaringan sosial dalam pengembangan agribisnis juga dapat dikaitkan dengan upaya Nee dalam menjelaskan konsep *new institutionalism* atau kelembagaan ekonomi baru yang dikembangkan Victor Nee (1998 dan 2005) yang menyatakan: *“New institutionalist sociology revisits the idea of context-bound rationality developed in the*

classical period of sociology and focuses on the social structural context within which individual interests and group norms develop as well as on the reciprocal role of norms and interests in effecting institutional change," (p. xv). Menurut Nee, *new institutionalism* adalah sebuah gagasan yang menggabungkan antara ekonomi institusional (*institutional economics*), dan teori ketertambatan Granovetter (*Granovetter's embeddedness theory*), yakni melekatnya jaringan sosial dalam struktur sosial.

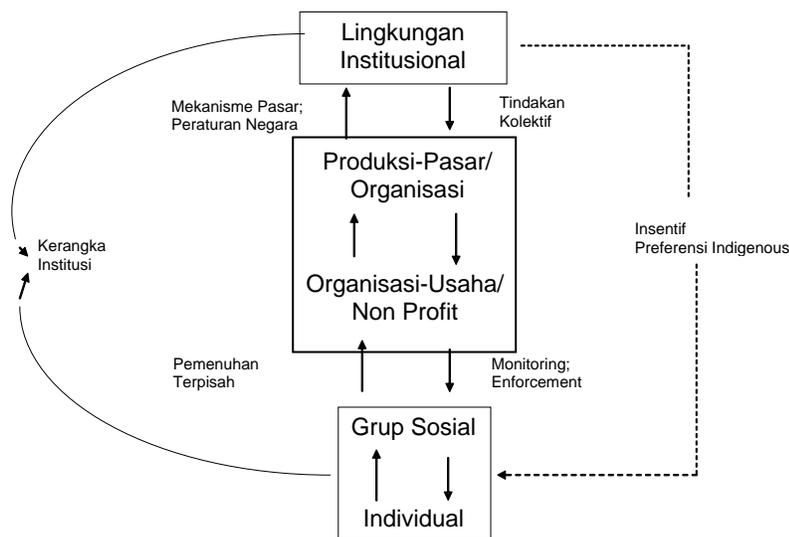
Beberapa Teori Sosiologi dalam Analisis Jaringan Sosial (Networks)

Teori Kelembagaan Baru (New Institutionalism)

Secara ringkas pemikiran Nee (2005) mengenai Teori Kelembagaan Baru diawali dengan gagasannya untuk menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial (*social network*) dan norma-norma sosial untuk mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Dalam tulisannya mengenai "*The New Institutionalisms in Economics and Sociology*," dimulainya dengan mengemukakan pendekatan yang digagas oleh Granovetter dalam memandang jaringan sosial yang menyatakan bahwa aktor ekonomi bukan atom yang lepas dari konteks masyarakat,

bukan pula sepenuhnya patuh pada aturan sosial. Tingkah laku aktor melekat pada realitas relasi sosial secara nyata dan berlangsung dalam relasi sosial antar individu maupun kelompok dalam struktur sosialnya. Relasi atau hubungan sosial bukanlah institusi. Dalam hal ini pandangan Kelembagaan Baru mengemukakan bahwa Granovetter hanya menjelaskan gejala-gejala mikro yang dekat dengan aspek agen atau individu anggota komunitas tanpa menjelaskan lebih banyak mengenai aspek yang berhubungan dengan struktur makronya. Juga menurut Nee, Granovetter tidak menjelaskan mengapa aktor ataupun agen dipandang terpisah dan terlepas dari hubungan sosial di tataran struktural dalam mengejar kepentingan ekonomi. Granovetter (1985) menjelaskan mengenai ketertambatan (*embeddedness*) jaringan, norma, dan kepercayaan dalam struktur sosial untuk merevitalisasi logika studi-studi sosiologi ekonomi. Lebih jauh ia berpendapat bahwa ikatan interpersonal diyakini memainkan peranan penting dalam pasar maupun perusahaan.

Berlandaskan kepada kritik terhadap pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economic*) dan mencermati pandangan Granovetter di atas, Nee mengemukakan model institusional baru dari perspektif sosiologi ekonomi yang digambarkan seperti berikut:



Gambar 1. Model Interaksi Regulasi Formal (Level Makro) dengan Organisasi (Level Messo), dan Individu pada Level Mikro (Nee, 2005)

Model multi level di atas menerangkan mengenai keterkaitan fungsi lingkungan institusional berupa regulasi formal yang diterapkan oleh pemerintah (*policy environment*) dalam menata hak-hak kepemilikan, menata pasar, dan perusahaan, yang berintegrasi dengan aturan formal dan informal di level meso (organisasi) dan juga pada level mikro (grup sosial dan individu). Model ini memandang mekanisme institusional memiliki penyebab yang lebih dalam karena sangat menentukan insentif. Dalam pandangan New Institutional, norma-norma yang ada akan berinteraksi dengan hukum formal (*formal rules*) dalam merealisasikan kepentingan individu.

Tabel 1. Prinsip-prinsip Dasar dari Sosiologi Ekonomi Kelembagaan Baru

Komponen	Deskripsi
Asumsi	<i>Rationality</i> terikat dalam konteks masyarakat; aktor didorong oleh interes, biasanya dibentuk oleh faktor kepercayaan, norma dan ikatan-ikatan jaringan sosial.
Aktor	Organisasi; individu mengartikulasikan interests di dalam organisasi dan network
Definisi institusi	Sistem saling hubungan antara institusi formal dan informal. Sistem ini memfasilitasi, mendorong dan mengatur tindakan ekonomi
Mekanisme level makro	UU, Peraturan pemerintah; mekanisme pasar; tindakan kolektif
Mekanisme level mikro	Tindakan individu dalam network/ organisasi; tindakan itu didorong oleh interest individu

Intinya, Nee mengemukakan adanya terjadi mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal, yakni pada tataran mikro (individu), meso (kelompok ataupun organisasi), dan tataran makro berupa lingkungan kebijakan (*policy environment*). Jika integrasi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka kemungkinan ada kecenderungan terjadi *inequality* sumber-sumber sosial seperti yang dikemukakan Lin (2000). Pada intinya ia membahas mengenai ketidakmerataan (*inequality*) kapital sosial dengan menganalisis hambatan struktural dan dinamika norma-norma sosial dalam interaksi masyarakat. Ia menjelaskan masalah *inequality* kapital sosial berdasarkan perspektif “*neo capital theories*” yakni suatu pendekatan yang

memandang bahwa aktor/individu ataupun komunitas dapat menguasai dan mengakumulasi sumber daya yang meliputi kapital fisik seperti lahan, uang, dan alat produksi lainnya, serta kapital non fisik yang meliputi kapital sosial maupun informasi.

Proposisi yang menarik dikemukakan adalah bahwa ketidakmerataan sumber daya (termasuk jaringan sosial) akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial (*social inequality*). Disini ia mengemukakan definisi kapital sosial sebagai investasi yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai hasil yang diharapkan, dan investasi itu tertambat (*embedded*) dalam relasi sosial. Lebih lanjut dikemukakan bahwa: “*Social capital is conceptualized as (1) quantity and/or quality of resources that an actor (be it an individual or group or community) can access or use through (2) its location in a social network. The first conceptualization of social capital emphasizes resources—the resources embedded in social relations, or social resources. The second conceptualization emphasizes locations in a network or network characteristics. The general proposition is that social capital enhances the likelihood of instrumental returns, such as better jobs, earlier promotions, higher earnings or bonuses, and expressive returns, such as better mental health*”

Kapital sosial dikonsepsikan sebagai kuantitas dan atau kualitas sumber daya yang oleh aktor (individu, kelompok, atau komunitas) dapat diakses dan dimanfaatkan melalui posisi atau lokasinya dalam jaringan sosial. Konsep di atas, menjelaskan bahwa yang pertama mengandung pengertian mengenai sumber kapital sosial yang dapat diakses pada relasi sosial, sedangkan konsep yang kedua memberi penekanan mengenai lokasi atau sumber kapital sosial berada pada jaringan sosial atau karakteristik jaringan sosial.

Pada tataran empiris, beberapa studi secara meyakinkan menemukan bahwa sumber daya sosial berpengaruh terhadap pencapaian hasil kegiatan seperti pada kegiatan mencari pekerjaan, promosi, dan kegiatan memenuhi nafkah. Bahkan beberapa studi secara empiris juga menyatakan sumber daya sosial sangat berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan status sosial ekonomi. Lebih lanjut, Lin mengetengahkan proposisi bahwa semakin baik posisi dalam kelompok,

organisasi, atau komunitas; maka semakin baik juga peluang dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya sosial. Demikian halnya mengenai proposisi bahwa semakin kuat jaringan sosial (semakin lemah ikatan sosial) akan berasosiasi positif dengan sumber daya sosial. Terakhir dikemukakan bahwa karakteristik jaringan sosial juga berpengaruh terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya sosial. Lin juga meyakini bahwa terdapat hambatan struktural antara lain berupa ketidakseimbangan posisi sosial ekonomi diantara individu, yang cenderung akan menggunakan kekuatan ikatan sosial mengikat dan faktor kekerabatan dalam mengakses sumber-sumber sosial. Hal ini tampaknya secara empiris belum mendapat fokus perhatian dari lingkungan kebijakan pemerintah Indonesia, sehingga tujuan pengembangan agribisnis masih sulit dicapai. Petani dan pelaku agribisnis lainnya cenderung terpinggirkan, sementara pencapaian target produktivitas merupakan suatu keniscayaan yang harus dicapai.

Teori Jaringan Sosial

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005). Selanjutnya, jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (networks) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan

dukungan dua dimensi lainnya karena kerja sama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya.

Lebih lanjut, dalam menganalisis jaringan sosial, Granovetter (2005) mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurutnya terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: *Pertama*, norma dan kepadatan jaringan (*network density*). *Kedua*, lemah atau kuatnya ikatan (*ties*) yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Dalam konteks ini ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu. *Ketiga*, peran lubang struktur (*structural holes*) yang berada di luar ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar. *Keempat*, interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya. Dalam hal ini Granovetter menyebutnya ketertambatan tindakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya jaringan sosial.

Demikian halnya mengenai ketertambatan kegiatan ekonomi dalam struktur, budaya, politik, bahkan agama. Satu hal lagi yang juga dikemukakan adalah mengenai adanya pengaruh yang sedemikian kuat dari struktur ataupun jaringan sosial terhadap pengembangan ekonomi yang menyangkut masalah pengaruh struktur sosial terhadap distribusi tenaga kerja, dalam hal ini dijelaskan bagaimana jaringan kerja memainkan peranan penting dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, disebutkan juga peranan jaringan kerja dalam dinamika pasar, terutama dalam hal pergeseran atau bahkan penetapan harga antara pembeli dan penjual yang timbul sebagai

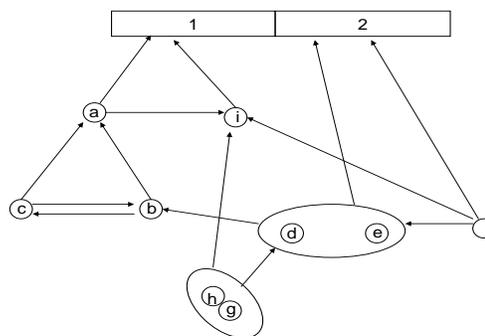
akibat jaringan sosial. Terakhir juga diuraikan oleh Granovetter, bagaimana jaringan sosial berperan sebagai sumber inovasi beserta adopsinya, sebagai gambaran adanya interpenetrasi kegiatan sosial dalam tindakan ekonomi.

Pada dasarnya jaringan sosial dan perannya dalam pengembangan agribisnis berbasis komunitas erat kaitannya dengan teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Roger (1983). Menurut teori ini, masuknya suatu inovasi dalam sistem sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berupa faktor internal yang berupa ciri-ciri atau karakteristik individu yang akan berkonsekuensi pada terjadinya perubahan dalam sistem sosial itu, sebagai akibat dari pengadopsian ataupun penolakan suatu inovasi dalam pengembangan agribisnis.

Schoorl (1980) mengemukakan bahwa perkembangan agraria - yang pada hakekatnya pengembangan agribisnis - ditentukan oleh sejumlah faktor yang satu sama lain banyak saling berhubungan. Dalam model itu, tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah memperbesar produksi dan melakukan perubahan-perubahan agraria untuk memberi jaminan sosial dan ekonomi yang mantap bagi petani. Pada tataran operasional, tujuan kedua ini diterima meskipun banyak yang hanya sebatas kata-kata.

Faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap kedua tujuan utama kebijakan pemerintah adalah: (a) Perbandingan manusia terhadap sumber daya lahan, yang tidak semata-mata menyangkut rata-rata tetapi lebih kepada luas lahan yang tersedia bagi petani untuk keperluan pengembangan agribisnis; (b) Kepadatan dan penambahan penduduk; (c) Perkembangan industri dan urbanisasi; (d) Sistem kebudayaan; (e) Struktur sosial; (f) Struktur agraria, terutama aspek distribusi tanah pertanian secara adil dan adanya jaminan yang mantap dalam hubungan dengan hak guna atau sewa dan pajak secara adil; (g) Fasilitas komunikasi dan informasi; (h) Infrastruktur agraria; dan (i) Penggunaan metode dan teknik baru, terkait dengan inovasi teknologi. Menurut Schoorl (1980), adopsi inovasi teknologi sangat esensial untuk perkembangan agraria dan sangat tergantung dari kebanyakan faktor-faktor lain, seperti terlihat dalam gambar 2.

Model Pembangunan Agribisnis



Gambar 2. Model Pembangunan Agribisnis (Schoorl, 1980)

Menurut gambar di atas, jalannya arus-arus terpenting yang menentukan pembangunan agraria dalam mencapai tujuan pembangunan adalah: (1) peningkatan produksi, dan (2) perubahan-perubahan agraria. Dalam beberapa hal terdapat pula hubungan timbal balik seperti antara faktor "d" (sistem kebudayaan), dengan "e" (struktur sosial). Sementara, Schoorl (1980) memandang bahwa inovasi teknologi (i) merupakan faktor sangat penting yang banyak dipengaruhi faktor lain dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan, terutama aspek peningkatan produksi.

Adopsi inovasi merupakan konsep yang merujuk kepada suatu proses, yakni proses mental yang terjadi pada diri individu sejak pertama kali mengenal inovasi sampai mengadopsinya. Inovasi menurut Price (1972) merujuk kepada dimensi waktu dalam menerapkan suatu gagasan atau ide-ide baru. Inovasi merupakan bagian dari konsep perubahan sosial yang mengandung adanya gejala modifikasi sistem struktur dan kultur. Semua inovasi merupakan perubahan sosial, tetapi perubahan sosial bukan inovasi.

Penyebaran atau diseminasi inovasi teknologi pada dasarnya merupakan transfer teknologi dari hasil-hasil penelitian kepada pengguna. Proses penyebaran inovasi tentunya sangat tergantung dari beberapa hal, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu prakondisi yang diperlukan dalam percepatan diseminasi inovasi teknologi adalah dengan penguatan terhadap

proses dan kondisi yang diperlukan, termasuk pemanfaatan potensi sumber daya lokal (Lionberger dan Gwin, 1991). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi antara lain adalah sifat-sifat inovasi itu sendiri, dan saluran komunikasi yang digunakan dalam diseminasi inovasi. Disamping itu, diketahui bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi meliputi: kondisi sosial ekonomi, karakteristik personal yang mencakup aspek rasionalitas dan sikap terhadap perubahan (Rogers, 1983; Roling, 1988; Van den Ban, A.W dan Hawkins H.S, 1988). Menurut Lawsons (2000), pengaruh inovasi teknologi dan ekonomi menyebabkan perubahan struktur, atau lebih konkritnya adalah perubahan kelas sosial sebagai akibat adanya mobilitas sosial, terutama mobilitas vertikal anggota masyarakat.

Penulis sependapat dengan pemikiran bahwa teori kelembagaan baru memberikan penekanan kepada interaksi komponen kapital sosial berupa jaringan sosial yang ada pada level mikro dan meso dengan hukum formal (*formal rules*) atau dapat dikatakan sebagai lingkungan kebijakan (*policy environment*) di level makro dalam merealisasikan kepentingan individu. Dalam pembangunan agribisnis nasional, cenderung terjadi yang sebaliknya, yakni adanya pengabaian peran sumber daya lokal di level meso dan mikro. Peran supra sistem dalam memfasilitasi suatu kegiatan selalu mengedepankan supra sistem yang bersifat *top down*, sehingga terkesan kurang inklusif dan cenderung mengalami kegagalan. Di Indonesia kasus-kasus serupa sangat banyak dijumpai, termasuk dalam hal pengembangan beberapa kegiatan mendukung program pengembangan sistem agribisnis sebagai salah satu program pembangunan pertanian.

Pada sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa di masyarakat sering ditemui adanya hambatan struktural dalam mengintegrasikan lingkungan kebijakan dengan karakteristik organisasi maupun individu anggota masyarakat di level mikro. Hal ini sejalan dengan teori *neo capital* yang dikemukakan oleh Lin (2000) yang menekankan ketidakmerataan (*inequality*) kapital sosial dengan menganalisis hambatan struktural antara lain berupa ketidakseimbangan posisi sosial ekonomi diantara individu, yang cenderung akan menggunakan kekuatan ikatan sosial mengikat dan

faktor kekerabatan dalam mengakses sumber-sumber sosial. Proposisi yang cukup menarik ia kemukakan bahwa ketidakmerataan sumber daya (termasuk kapital sosial) akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial (*social inequality*). Kapital sosial dikonsepsikan sebagai kuantitas dan atau kualitas sumber daya yang oleh aktor (individu, kelompok, atau komunitas) dapat diakses dan dimanfaatkan melalui posisi atau lokasinya dalam jaringan sosial. Konsep di atas menjelaskan bahwa yang pertama mengandung pengertian mengenai sumber kapital sosial yang dapat diakses pada relasi sosial, sedangkan konsep yang kedua memberi penekanan mengenai lokasi atau sumber kapital sosial berada pada jaringan sosial atau karakteristik jaringan sosial. Demikian halnya mengenai proposisi bahwa semakin kuat jaringan sosial (semakin lemah ikatan sosial) akan berasosiasi positif dengan sumber daya sosial. Pandangan Lin (2000) tentunya sangat kontributif dalam menganalisis distribusi sumber-sumber sosial dalam masyarakat. Fenomena elitisme agribisnis merupakan satu contoh implikasi dari implementasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia yang kurang memberikan perhatian kepada interaksi lingkungan kebijakan (*policy environment*) dengan karakteristik individu, organisasi sosial, pada komunitas.

Sejalan dengan pandangan itu, Garanovetter (2005) mengutarakan mengenai teori jaringan sosial dengan menjelaskan hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi seperti yang telah diutarakan di muka. Dalam hal ini Granovetter menyebutnya ketertambatan tindakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi, seperti halnya bagaimana jaringan sosial berperan sebagai sumber inovasi yang terkait dengan teori difusi inovasi. Sayangnya dalam dinamika pembangunan pertanian di Indonesia ada anggapan bahwa inovasi yang didesiminasikan kepada masyarakat akan selalu melalui tahapan yang linear dan homogen. Karakteristik sosiologis yang mencakup struktur dan kultur masyarakat kurang dicermati, sehingga teori difusi inovasi sering diterapkan dengan model yang sama di setiap wilayah. Dalam konteks Indonesia, hal ini terjadi saat maraknya program penyuluhan pertanian yang ditujukan untuk mendongkrak produktivitas. Para penyuluh ataupun bahkan birokrasi pembangunan pertanian memberlakukan pedoman dan pe-

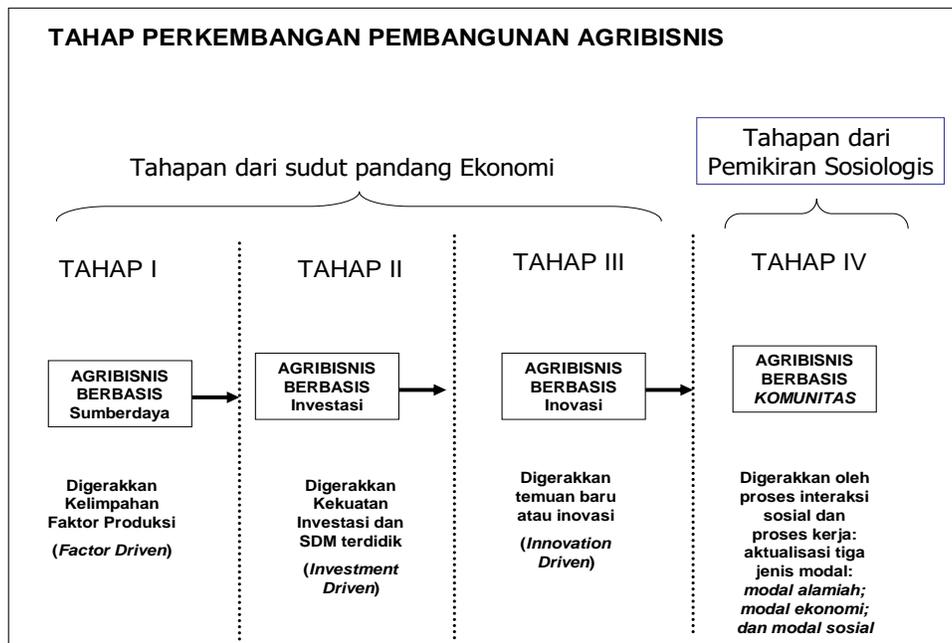
tunjuk teknis dalam penyuluhan dengan persepsi bahwa tahapan yang dilalui dalam proses itu adalah sama di seluruh daerah. Hal ini berdampak terhadap seragamnya strategi dan kebijakan penyuluhan pertanian di Indonesia, tanpa mencermati aspek spesifik lokasi. Akibatnya, peningkatan produktivitas dan pencapaian peningkatan pendapatan akan sulit dicapai.

JARINGAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS KOMUNITAS: “ Pengalaman di Indonesia”

Pengembangan agribisnis merupakan upaya pemerintah membangun suatu sistem atau struktur agribisnis yang mencakup industri hulu pertanian, usaha budidaya (*on-farm*), industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Definisi formal itu memperlihatkan bahwa pengembangan agribisnis belum sepenuhnya berorientasi kepada aspek pengembangan aktor manusia pelaku agribisnis. Menurut Sitorus (1999), bahaya elitisme agribisnis terkait dengan sifat elitisme yang melekat pada agribisnis sebagai artikulasi cara produksi kapitalis atau sekurang-kurangnya komersialis.

Sifat elitisme juga dimaksudkan sebagai pemihakan agribisnis pada kepentingan elit ekonomi, yaitu para pemilik modal. Sehubungan dengan itu pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal termasuk kapital sosial, diyakini dapat mereduksi peluang elitisme agribisnis.

Dalam rangka mengantisipasi bahaya elitisme agribisnis itu, maka Kritik Sosiologi yang dikemukakan oleh Sitorus *et.al* (2001) sangat baik untuk dicermati. Kritik yang disampaikan dalam laporan hasil penelitiannya mengenai *Agribisnis Berbasis Komunitas: “Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial”*, diawali dengan mengemukakan tahapan perkembangan agribisnis yang dilandasi pemikiran dari sudut Ekonomi yang terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, agribisnis berbasis sumber daya, yaitu pembangunan agribisnis yang digerakkan oleh kelimpahan faktor produksi (*factor driven*) yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang *unskilled labor*. Tahap kedua adalah pembangunan agribisnis yang berbasis investasi (*investment driven*) yang padat modal dengan didukung tenaga kerja terdidik (*capital intensive and skilled-labor*). Kemudian tahap yang terakhir adalah pembangunan agribisnis yang berbasis inovasi (*innovation driven*) yang lebih digerakkan oleh kemajuan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia terdidik



Gambar 3. Tahapan Perkembangan Pembangunan Agribisnis (disarikan dari Sitorus *et al.*, 2001)

(*science and skilled labor-based*). Secara ringkas, visualisasi dari ketiga tahapan dan alternatif pemikiran sosiologis perkembangan pembangunan agribisnis dapat dilihat pada Gambar 3.

Menurut Sitorus *et al.* (2001), pada titik ini konsep ekonomi neo klasik tentang kelemahan sistem agribisnis tersebut dihadapkan pada suatu kritik sosiologi, yang berkenaan dengan adanya bahaya penyingkiran mayoritas kaum tani. Dari sudut pandang sosiologi, proses pembangunan sistem agribisnis bertahapan tiga sebagaimana dirumuskan para ahli ekonomi tersebut di atas cenderung bersifat elitis.

Studi yang dilakukan Sitorus *et al.* (2001) merupakan upaya yang kuat untuk mengkaji pengalaman empiris mengenai dampak pembangunan pertanian yang kurang berorientasi kepada masyarakat (*people center development*). Oleh karena itu ada tantangan bagi sosiolog untuk merumuskan suatu pengembangan sistem agribisnis yang bersifat melibatkan mayoritas kaum tani sebagai subyek tidak semata-mata hanya sebagai obyek. Tantangan itulah yang melandasi munculnya pemikiran tentang agribisnis berbasis komunitas. Konsep agribisnis berbasis komunitas mesti dipahami sebagai proses interaksi sosial dan proses kerja sekaligus, dan di dalam proses tersebut teraktualisasikan tiga jenis modal, yaitu modal alamiah, modal ekonomi, dan modal sosial (kapital sosial). Sinergi ketiga jenis kapital itulah yang semestinya menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan maupun operasionalisasi suatu kebijakan pembangunan pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa keseimbangan (*equality*) dan inklusifitas dalam pembangunan masih sangat diperlukan guna mencapai sasaran ataupun tujuan pembangunan, yang tentunya tidak hanya masalah produktivitas, melainkan bagaimana komunitas agribisnis dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya melalui pemberdayaan dan pengembangan jaringan sosial sebagai salah satu dimensi kapital sosial.

KESIMPULAN

Paparan di atas memperlihatkan perkembangan ataupun perbedaan berkenaan

dengan konsep definisi kapital sosial, sumber dan jenis kapital sosial, serta metode yang digunakan dalam menjelaskan kapital sosial. Hal ini terjadi baik di kalangan ilmu sosiologi maupun ekonomi. Meskipun demikian, perbedaan cara pandang dan metode analisis tersebut ternyata tidak saling bertentangan terutama dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam upaya pengembangan komunitas agribisnis yang dikaitkan dengan mobilitas vertikalnya.

Pada dasarnya kapital sosial terdiri dari tiga dimensi utama yakni kepercayaan (*trust*), norma, dan jaringan (*network*). Berdasar sifatnya, kapital sosial dapat bersifat mengikat (*bonding*), menyambung (*bridging*), dan yang bersifat mengait (*linking*). Sifat kapital sosial itu sangat kentara dalam dimensi jaringan sosial. Peran yang dimainkan oleh jaringan sosial dalam pembangunan tidak sama di setiap wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kapital sosial juga bervariasi antar wilayah, demikian juga dampak yang ditimbulkannya. Aspek yang terakhir ini sangat jarang dikemukakan oleh ahli kapital sosial. Dengan demikian, jaringan sosial juga bersifat *local indigeneous*, atau mengandung dimensi kelokalan yang tidak dapat digeneralisasikan dalam setiap kajian.

Studi-studi mengenai jaringan sosial dalam perspektif sosiologi ekonomi masih didominasi oleh topik-topik yang mengkaitkan jaringan sosial itu dengan kesejahteraan, kemiskinan, ataupun pembangunan ekonomi pada umumnya. Sebagian besar unit analisisnya cenderung di tataran mikro-meso, dan sedikit yang sudah mulai menganalisis jaringan sosial di tingkat meso dan makro. Kasus-kasus dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman struktur maupun kultur, etnis, agama, tidak cukup dianalisis pada taraf mikro saja. Sebagian besar sistem sosial masyarakat Indonesia memiliki spesifikasi struktur maupun kultur, yang di dalamnya mengandung kapital sosial yang potensinya beragam, sehingga pengembangan dan pemberdayaan jaringan sosialnya juga relatif berbeda dan terkait dengan sifat ikatan sosial di setiap wilayah. Oleh karenanya sangat penting untuk menganalisis aspek kekuatan ikatan (lemah atau kuat), aspek menyambung (lemah atau kuat), dan aspek mengait (lemah atau kuat) dalam pengembangan agribisnis.

Dalam memahami konsep agribisnis berbasis komunitas sebagai proses interaksi sosial dan proses kerja sekaligus, yang di dalamnya teraktualisasikan tiga jenis modal yaitu modal alamiah, modal ekonomi, dan modal sosial (kapital sosial); harus memperhatikan jaringan sosial yang ada. Sinergi ketiga jenis modal tersebut adalah yang semestinya menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan maupun operasionalisasi suatu kebijakan pembangunan pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan (*equality*) dan inklusifitas dalam pembangunan tetap perlu selalu diciptakan guna mencapai sasaran pembangunan, yang tentunya tidak hanya masalah produktivitasnya, melainkan bagaimana individu anggota komunitas agribisnis dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Bourdeau, P. 1986. The Forms of Capital. *dalam* J Richardson, ed. Handbooks of Theory and Research for Sociology of Education. Westport, CT. Greenwood Press.
- Coleman, JS. 1988. Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. Volume 94.
- Dasgupta P dan Serageldin I. 2002. Social Capital: A Multi Faceted Perspective. World Bank, Washington.
- Davis, J. Dan Goldberg, R. 1957. A Concept of Agribusiness. Harvard University, Boston, USA *dalam* Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2005. Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2005-2009. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2006. Pedoman Umum Prima Tani-Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian. Jakarta.
- Granovetter M. 2005. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic Perspectives. Vol. 19 No. 1.
- Grootaert C; Oh Gi-Taek; Swamy A. 2002. Social Capital, Household Welfare and Poverty in Burkina Faso. Journal of African Economic, Vol.11 No.1.004-38.
- Grootaert C. 1999. Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia. World Bank Working Paper (unpublished).
- Horton, P.B dan Hunt, C.L. 1984. Sosiologi (Dialibahasakan Aminudin Sam). Penerbit Erlangga. Surabaya.
- Ibrahim, Linda Darmajanti 2005. Kehidupan Berorganisasi sebagai Modal Sosial Komunitas Bali. Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Johnson, DP. 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang). Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Lawang, R.M.Z. 2005. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik. Cetakan Kedua. FISIP UI Press. Depok.
- Lawson, T; Jones, M; dan Moores R. 2000. Advanced Sociology Through Diagrams. Oxford University Press. Oxford New York.
- Levitte, Y. 2004. Bonding Social Capital in Entrepreneurial Developing Communities-Survival Networks or Barriers?. Journal of the Community Development Society. Columbus:2004. Vol.35.
- Lin, N. 2000. Inequality in Social Capital. Contemporary Sociology. Washington: Nov 2000. Vol. 29 p: 785, 11 pgs
- Lionberger, HF and Gwin, PH. 1991. Technology Transfer from Researchers to User. University of Missouri. Missouri.
- Liu, A.Q dan Besser, T. 2003. Social Capital and Participation in Community Improvement Activities by Elderly Residents in Small Town and Rural Communities. Rural Sociology. College Station: Sep 2003. Vol 68; p: 343
- Nee, Victor. 2005. The New Institutionalisms in Economics and Sociology. *In* Smelser J. Neil and Richard Swedberg (eds) The Handbook of Economic Sociology. Princeton University Press.
- Netting, R M.C. 1993. Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture. Stanford University Press. California.
- Nunn A, Johnson S, Monro S, Bickerstaffe T, and Kelsey S. 2007. Factor Influencing Social Mobility (Research Report No.450, Carried Out by the Policy Research Institute on Behalf of the Departemen Of Work and Pensions United Kingdom). Norwich NR3 1 BQ.
- Pantoja E. 1999. Exploring the Concept of SC and Its Relevancy for Community based Development. The case of Mining Areas in Orissa, India. South Asia. Infrastructure Unit, The World Bank.

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009
- Putnam, R. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Ritzer, G dan Goodman D.J. 2003. *Modern Sociological Theory*. Mc.Graw-Hill.
- Rogers, E.M. 1983. *Diffusion of Innovation*. The Free Press. New York.
- Roling, N. 1988. *Extension Science*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Roth, G dan Wittich. 1978. *Max Weber: Economy and Society*. University of California Press. Berkeley (p.24-26).
- Rudestam, K.E & Newton R.R. 2001. *Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process (Second Edition)*. Sage Publication, Inc. London.
- Schoorl, J.W. 1980. *Sociologie Der Modernisering (Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang)*, Diterjemahkan Soekadjo, R.G. 1980). PT. Gramedia. Jakarta (214-216).
- Silva, D.MJ; Harpham, T; Huttly SR; Bartolini, R; and Penny, ME. 2007. "*Understanding Sources and Types of Social Capital in Peru*" dalam *Community Development Journal*. Oxford: Jan 2007. Vol 12,Iss 1; p 19 pages
- Sitorus, M.T.F, Soetarto, E. Lubis, D.P, Agusta, I. Pambudy, R (2001). *Agribisnis Berbasis Komunitas: Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial*. Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan untuk PT. Sang Hyang Seri (Persero) Bali dan Pusat Kajian Agria, Lembaga Penelitian IPB. Bogor. Pustaka Wira Usaha Muda. Bogor.
- Sitorus, M.T.F. 1999. Bahaya Elitisme Agribisnis. Suatu Artikel dalam TROPIS No.10. Th. I. September 1999: h.29
- Smelser J. Neil and Richard Swedberg. 2005 ("Introducing Economic Sociology") (eds), in *the Handbook of Economic Sociology*. Princeton University Press.
- Taylor, John G. 1989. *From Modernization to Modes of Production. A Critique of Sociologist of Development and Underdevelopment*. Macmillan. London.
- Van den Ban A.W dan Hawkins, H.S. 1988. *Agricultural Extension*. Longman Scientific & Technical, New York.
- Vipriyanti. N.U. 2007. *Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan Antara Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah: Disertasi Pascasarjana IPB*.Bogor
- Woolcock M, dan Narayan D. 2000. *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. The World Bank Research Observer. Vol.15.No.2 (Agustus 2000) p:225-249.